



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
DAERAH DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL
MODERASI:**

**(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2020)**

Disusun oleh:

Ardianti Gita Kusumawardhani
1904434004

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Mei 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
DAERAH DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL
MODERASI:**

**(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2020)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak)**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Ardianti Gita Kusumawardhani

1904434004

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Mei 2023



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Ardianti Gita Kusumawardhani

NIM : 1904434004

Tanda tangan :

Tanggal : 18 Juli 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ardianti Gita Kusumawardhani
NIM : 1904434004
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI:
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2020)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Taufikul Ichsan, S.E., Ak., M.M. 
Anggota Penguji : Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.
NIP.196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ardianti Gita Kusumawardhani
Nomor Induk Mahasiswa : 1904434004
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA DAERAH DENGAN BUDGET
RATCHETING SEBAGAI VARIABEL
MODERASI:
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2016-2020)

Disetujui Oleh:

Pembimbing


**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA
NIP. 197202221999031003

Ketua Program Studi

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak., CTA., CPIA.
NIP. 196302031990031001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dengan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020”** dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Terselesainya penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, serta ajaran dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesediaan waktunya dalam memberikan bimbingan sampai skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPIA. selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan yang telah memberikan warna disela-sela bimbingan saya.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta jajarannya Staff Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
4. Kedua orang tua penulis: Mama dan Bapak; serta Adik penulis: Tyo, dan Pras yang memberi dukungan dan mendoakan mulai pada tahap awal perkuliahan sampai pengerjaan Skripsi.
5. Dalilah dan Alvina yang setia menjadi teman saya dalam bertukar pikiran.
6. Segenap rekan-rekan jajarannya pegawai Kantor Akuntan Publik Meidina Ratna (MRA).
7. Teman-Teman Kelas (Lamborghini) yang telah bersama-sama berjuang di awal perkuliahan hingga akhir.
8. Teman-teman “CDR CMSS” yang dengan senang hati mendukung.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga sarandankritik yang membangun diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Depok, 15 Juli 2023

Ardianti Gita K.
NIM 1904434004





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardianti Gita Kusumawardhani
NIM : 1904434004
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI: (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2020)

Dengan hak bebas royalty noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Yang menyatakan

Ardianti Gita Kusumawardhani



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI:

(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2020)

Ardianti Gita Kusumawardhani

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel bebas yang diukur dengan jumlah beberapa pos penerimaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah sebagai variabel terikat yang diukur dengan melihat pos-pos pengeluaran dalam Laporan Realisasi Anggaran, kemudian Ratcheting Anggaran sebagai variabel moderasi yang diukur dengan model Aranda (2010). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan di 30 Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta pada tahun 2016 – 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan Ratcheting Anggaran sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

Kata kunci: Belanja Daerah, Ratcheting Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME ON REGIONAL EXPENDITURES USING BUDGET RATCHETING AS A MODERATION VARIABLE:

(CASE STUDY IN DISTRICT/CITY GOVERNMENTS IN DKI JAKARTA PROVINCE, 2016-2020)

Ardianti Gita Kusumawardhani

Study Program D4 Financial Accounting

ABSTRACT

The variables tested in this study consisted of Regional Original Income as an independent variable measured by the number of several revenue items in the Realized Budget and Regional Expenditure Report as the dependent variable measured by looking at expenditure items in the Realized Budget Report, then Budget Ratcheting as a moderating variable as measured by the Aranda model (2010). The sample in this study was conducted in 30 Regencies / Cities of DKI Jakarta in 2016 - 2020. The results of the study showed that the Local Revenue significantly affected Regional Expenditure and Budget Ratcheting as a moderating variable strengthening the relationship between Own Revenue and Regional Expenditure.

Keywords: Regional Expenditure, Budget Ratcheting, Budget Realization Report, Local Revenue.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2. RumusanMasalah.....	4
1.3. PertanyaanPenelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. ManfaatPenelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pendapatan Asli Daerah	8
2.2. Belanja Daerah.....	11
2.2.1 Belanja Operasi.....	12
2.2.2 Belanja Modal	12
2.2.3 Belanja Lain-lain/Belanja Tak Terduga.....	13
2.3. <i>Budget Ratcheting</i>	13
2.4. Penelitian Terdahulu	14
2.5. Kerangka Konseptual.....	16
2.6. Hipotesis	17
1. PengaruhPendapatanAsli Daerah terhadap Belanja Daerah	17

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Pengaruh <i>Budget Ratcheting</i> terhadap Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah	17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	19
3.2. Objek Penelitian.....	19
3.3. Sampel.....	20
3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	20
3.5. Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	20
3.6. Metode Analisis Data.....	21
1 Statistik Deskriptif	21
2 Uji Normalitas.....	21
3 Uji Asumsi Klasik.....	22
4 Analisis Regresi Sederhana.....	23
5 <i>Moderating Regression Analysis</i>	24
6 Pengujian Hipotesis.....	25
3.7. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	26
1. Variabel Independen (X).....	26
2. Variabel Dependen (Y)	26
3. Variabel Moderasi (Z).....	27

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	28
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	29
4.3 Tahapan Penelitian	32
1. Analisis Statistik Deskriptif	32
2. Uji Normalitas.....	33
3. Uji Asumsi Klasik.....	34
4. Analisis Regresi Sederhana	36
5. <i>Moderating Regression Analysis</i>	37
6. Pengujian Hipotesis.....	39
4.4 Hasil Penelitian	43
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.....	17
2. Pengaruh <i>Budget Ratcheting</i> terhadap Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah.....	17

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	44
----------------------	----

5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	48



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual16

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatter Plot35





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Sampel.....	20
Tabel 4.1 Prosedur Penentuan Data	29
Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah.....	29
Tabel 4.3 Belanja Daerah.....	30
Tabel 4.4 Budget Ratcheting.....	31
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	32
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	33
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	34
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	36
Tabel 4.9 Hasil Analisa Regresi Sederhana.....	37
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Moderating Regression Analysis.....	38
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.....	39
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah, Budget Ratcheting, dan Pendapatan Asli Daerah X Budget Ratcheting terhadap Belanja Daerah	39
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	40
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t.....	42

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi ditandai disahkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggaran berbasis kinerja yang disusun oleh pemerintah berisi tentang kapasitas kinerja, target kinerja yang harus dicapai, dan alokasi biaya yang sesuai dengan jenis kegiatan dan sasaran program. Penggunaan berbagai jenis anggaran sebagai dasar dalam penentuan target anggaran, hal ini merupakan konteks yang menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran ada kecenderungan untuk melakukan perubahan pada anggaran (inkrementalisme) (Vinna Novita Sari, 2020)

Penganggaran pada prosesnya, besar kemungkinan keputusan yang diambil dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti politik, ekonomi, dan teknologi, namun dampak dari faktor – faktor tersebut tidak bisa diketahui sampai anggaran terealisasi (Forester, 1991 dalam Abdullah dan Nazry, 2014). Era desentralisasi saat ini, anggaran merupakan poin penting dari pengelolaan keuangan daerah yang diurus secara mandiri, sehingga aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terfokus pada anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang mandiri terlihat dari bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pelayanan kepada masyarakat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan (UU No. 1 Tahun 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, dan juga sebaliknya dengan begitu maka akan terjadi ketimpangan PAD.

Penelitian oleh Sakagauchi (2018) menemukan bahwa manajer pada perusahaan cenderung meminta anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya, bahkan jika kebutuhan actual mereka lebih rendah dan sudah terjadi beberapa permasalahan. *Budget Ratcheting* adalah fenomena di mana manajer departemen atau unit organisasi mengalokasikan atau meminta anggaran untuk tahun berikutnya berdasarkan anggaran mereka pada tahun sebelumnya, meskipun kebutuhan actual mereka mungkin berbeda atau berkurang. Dalam banyak kasus, *Budget Ratcheting* menghasilkan anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun secara bertahap, tanpa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran.

Penelitian mengenai *Budget Ratcheting* dalam penganggaran organisasi sektor publik telah dilakukan dengan berbagai konteks. Penelitian Lee dan Plummer (2007) menjelaskan adanya efek *ratchet* dalam anggaran sekolah di Texas. Ahn et al. (2018) meneliti mengenai intensitas *ratcheting* pada Badan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Usaha Milik Negara (BUMN) di Korea. Salah satu instrument pengukuran kinerja pemerintah diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan (Bawono, Halim dan Lord, 2012). Pengukuran kinerja dilakukan oleh badan legislatif untuk mengambil keputusan mengenai alokasi anggaran tahun berikutnya pada setiap bagian organisasi pemerintahan daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD)¹.

Lee dan Plummer (2007) serta Aranda dan Arellano (2010) menemukan adanya hubungan positif antara varians anggaran (perbedaan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang dianggarkan) periode berjalan dengan anggaran periode berikutnya. Ini sebagai dasar dalam penetapan target selanjutnya yang disebut *Budget Ratcheting* (Lim, 2011 dalam Abdullah dan Junita, 2016). *Budget Ratcheting* menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendapatan periode berikutnya cenderung lebih responsif terhadap varian anggaran pendapatan periode berjalan dibandingkan penurunan pendapatan pada periode berikutnya sebagai berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran periode berjalan. Artinya, kekurangan dalam pendapatan periode berjalan tidak terkait dengan tinggi rendahnya pendapatan di masa mendatang (Lim, 2011). Keduanya pun dihubungkan dalam pentingnya pengawasan dan pengendalian yang ketat dalam penganggaran sector publik.

Budget ratcheting dapat menjadi faktor penentu dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena *Budget Ratcheting* menyebabkan belanja daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun tanpa mempertimbangkan kebutuhan actual dan efektivitas program yang dijalankan. Sektor publik memiliki permasalahan yang hampir sama dengan sektor swasta, dimana berkembangnya praktik *moral hazard* yang dilakukan oleh pihak agen (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selama penganggaran seperti *budget maximazer* atau menaikkan anggaran karena agen memiliki informasi yang lebih dibanding dengan prinsipal (Abdullah, 2013).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki catatan prestasi yang cukup baik terutama pada sisi pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

¹Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(APBD) Pemprov DKI Jakarta meningkat dari tahun ke tahun. Pada sisi pendapatan daerah mengalami peningkatan rata – rata sebesar 10% per tahun selama kurun waktu 2016 – 2020 dan 15% per tahun di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Pemprov DKI Jakarta mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp 43 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 61 Triliun pada tahun 2020 meskipun di tengah pandemic COVID-19. Aspek realisasi dari PAD menunjukkan angka yang lebih tinggi selama kurun waktu periode anggaran untuk melampaui target anggaran yang direncanakan. Perkembangan yang terjadi pada komponen pendapatan di APBD Pemprov DKI Jakarta mengindikasikan bahwa anggaran pemerintah di sisi pendapatan cenderung *underforecast*.

Belanja Daerah Pemprov DKI Jakarta mengalami pertumbuhan rata – rata 16 % per tahun selama kurun waktu 2016 – 2020. Belanja Daerah yang pada tahun 2016 sebesar Rp68,7 Triliun menjadi Rp 91,2 Triliun di tahun 2020. Namun, realisasi Belanja Daerah cenderung fluaktif di angka 35 - 65% dari anggaran yang direncanakan. Situasi ini mengindikasikan bahwa capaian realisasi anggaran memerlukan peningkatan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan *Budget Ratcheting* memengaruhi hubungan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian tentang *Budget Ratcheting* dalam sektor pemerintahan penting dilakukan karena beberapa hal, diantaranya : pertama, efek *budget ratcheting* pada proses penyusunan anggaran pemerintah daerah cenderung mengindikasikan adanya perilaku bias untuk bersikap oportunistik dalam penyusunan anggaran yang dapat mempengaruhi anggaran tersebut dari tahun sebelumnya ke tahun depan. Pertumbuhan anggaran pemerintah secara umum mengacu pada norma klasik, dimana realisasi anggaran tahun sebelumnya ditambah tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan anggaran yang tidak efisien (Lee dan Plummer, 2007; Marlowe, 2009). Dampak berupa kecenderungan untuk produksi pada barang dan jasa publik, *effort reduction*, dan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang tidak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penting menjelang akhir tahun anggaran (Lee dan Plummer, 2007). Sehingga akibat dari kondisi tersebut pertumbuhan dari anggaran yang tidak efisien dan merugikan kepentingan publik. Kedua, *Budget Ratcheting* akan memperlihatkan bahwa anggaran pada periode selanjutnya mengandung *incrementalism* yang tidak selaras dengan tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan akurasi tahapan perencanaan dan memperkuat aspek akuntabilitas kinerja dalam siklus penganggaran. Sejauh mana peran *Budget Ratcheting* dalam memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2016-2020.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah memengaruhi Belanja Daerah?
2. Apakah *Budget Ratcheting* memengaruhi terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah *Budget Ratcheting* memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literature di bidang penganggaran pemerintah daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan penyusunan anggaran pemerintah daerah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dalam menyusun anggaran daerah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyusunan skripsi dari awal bab hingga bab terakhir (Ahmad, dkk, 2021: 85-91). Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan terdiri dari subbab-subbab yang terhubung, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN.

Terdiri dari latar belakang penelitian yang menjelaskan secara singkat mengenai Undang-undang Pendapatan Asli Daerah hingga dasar *Budget Ratcheting* kemudian rumusan masalah terkait efek *Budget Ratcheting* dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah yang akan dikaji diikuti dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya juga dijelaskan tentang tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini yang meliputi penjelasan Pendapatan Asli Daerah, pengidentifikasian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap daerah, analisis yang dilakukan terhadap pengaruh *Budget Ratcheting* terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dan pemaparan hasil analisis.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.

Terdiri dari teori-teori tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan *Budget Ratcheting* yang relevan dan menjadi landasan konsep penelitian ini. Kemudian subbab mengenai hasil penelitian terdahulu yang menimbulkan gap dan menjadi rujukan penelitian ini. Subbab berikutnya adalah uraian kerangka pemikiran yang menjelaskan dan menggambarkan logika berpikir peneliti berkaitan dengan topik penelitian.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 3 : METODE PENELITIAN.

Berisi metode penelitian yang meliputi deskripsi jenis penelitian yang dilakukan, subyek dan obyek penelitian, metode pengambilan sampel yang dilakukan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, jenis data yang dibutuhkan, sumber data yang merupakan subyek atau asal perolehan data, metode pengumpulan data yang meliputi tahapan pemerolehan data, periode/waktu pengumpulan data dan teknik/cara pengumpulan data penelitian, kemudian dilanjutkan dengan metode analisis data yang merupakan penjelasan cara/teknik analisis atau pemilihan alat analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data penelitian.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hasil penelitian dan pembahasan, mendeskripsikan tentang identifikasi/temuan data terkait pengaruh *Budget Ratcheting* terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah, yang kemudian dilakukan proses analisis secara sistematis dengan cara/metode kuantitatif untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan dideskripsikan hasil analisis data yang menggambarkan jawaban peneliti atas pertanyaan penelitian secara lebih komprehensif. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang menguraikan penafsiran dari hasil analisis dan kajian untuk mendukung kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini.

BAB 5 : PENUTUP.

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan inti/ringkasan dari isi penelitian ini yang mengacu pada tujuan penelitian dan saran perbaikan/penyelesaian masalah bagi subyek penelitian berdasarkan hasil penelitian ini maupun saran bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap 6 Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 – 2020 dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar $3,376 > 1,661$ dan $\text{sig } 0,001 < 0,005$, sehingga dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dan hal ini mendukung hipotesis yang dirumuskan.
2. Hasil penelitian menunjukkan penurunan pada *Adjusted R Square* dari 0,374 atau 37,4% pada regresi pertama dan mengalami penurunan setelah regresi kedua (MRA) menjadi 0,361 atau 36,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Budget Ratcheting* memperlemah dalam hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran peneliti selanjutnya agar menambah variabel penelitian lain yang memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, seperti luas wilayah, demografi, dan lain – lain.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Ramadhaniatun Nazry. 2014. *Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah:Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan*. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol. 6 No. 2 : 72-283.
- Abdullah, Syukriy & Afrah Junita. 2016. *Bukti Empiris tentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Aceh*. Jurnal Modus Vol. 28 No. 2: 185-202.
- Aranda, Carmen dkk. 2010. *Ratcheting Effect and The Role of Relative Target Setting*.
- Agus B.S. dan Mohamad A.R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2013, Hal. 184 – 198 Vol. 20, No. 2 ISSN: 1412-3126, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.
- Andrean, A. dan Vita F.S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, Seri A, Hal. 1984-2000, ISSN: 2656-3649
- Aranda, C., Arellano, J., & Davila, A. 2010. Ratcheting and the role of relative target setting. *the accounting review* , 1197-1226
- Bawono, I.R., Halim, A & Lord, B. 2012. *Public sector performance measurement and budget allocation: An Indonesian experiment*. artikel dipresentasikan di the 6th NZ Management Accounting Conference, New Zealand.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bouwens, Jan & Peter Kroos. (2010). *Target Ratcheting and Effort Reduction*. Journal of Accounting and Economics 51(1-2): 171-185.

Fozzard, Adrian. 2001. *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting*. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147.

Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2002. *Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Disertasi.

Lee, Tanya M. & Elizabeth Plummer. 2007. *Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures*. Journal of Management Accounting Research 19: 137-167.

Leone, A. & S. Rock. 2002. *Empirical Tests of Budget Ratcheting and Its Effect on Managers' Discretionary Accrual Choices*. Journal of Accounting and Economics 33: 43-67.

Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Marlowe, J. 2009. *Budget variance, slack resources, and municipal expenditures*. SSRN Library.

Nurhayati, Neni. 2018. *Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon*. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi 4(1): 29 – 32

Safitri, A.A.dan Vita F. S. (2020). *Efek Budget Ratcheting Pada Anggaran Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-*

2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 3, Seri A, Hal 2992-3011, ISSN: 2656-3649*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

**© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta****Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2021	(Dalam Rupiah)		
				Realisasi 31 Desember 2021 (Audited)	Realisasi 31 Desember 2020 (Audited)	
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	37.215.000.000.000	34.575.563.219.175	92,91	31.895.263.277.623
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	755.755.000.000	383.859.710.282	50,79	496.332.944.408
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	390.254.277.917	398.792.009.852	102,19	672.491.534.639
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	6.821.077.973.050	6.248.092.466.321	91,60	4.350.666.954.523
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09	37.414.754.711.193
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
9	Dana Perimbangan		16.830.173.929.828	22.630.423.484.052	134,46	16.897.722.313.632
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	13.467.276.643.787	19.396.960.594.125	144,03	13.647.958.485.055
11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.2	58.910.465.041	46.940.443.417	79,68	26.672.755.000
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.3	3.303.986.821.000	3.186.522.446.510	96,44	3.223.091.073.577
13	Dana Insentif Daerah (DID)		43.370.860.000	43.370.860.000	100,00	65.176.975.000
14	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2	43.370.860.000	43.370.860.000	100,00	65.176.975.000
15	Total Pendapatan Transfer (9 + 13)		16.873.544.789.828	22.673.794.344.052	134,37	16.962.899.288.632
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
17	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	3.153.473.000.000	1.286.907.449.318	40,81	1.509.350.237.902
18	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (17)		3.153.473.000.000	1.286.907.449.318	40,81	1.509.350.237.902
19	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 15 + 18)		65.209.105.040.795	65.567.009.199.000	100,55	55.887.004.237.727
20	BELANJA					
21	BELANJA OPERASI					
22	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.a	19.486.422.916.768	18.816.237.919.714	96,56	16.686.870.974.289
23	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.b	23.122.499.841.360	21.488.663.347.585	92,93	16.775.617.945.811
24	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.c	168.200.000.000	86.116.019.366	51,20	62.300.098.791
25	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.d	5.371.148.641.636	4.355.291.571.465	81,09	3.628.167.400.666
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.e	2.791.731.235.260	2.651.074.469.075	94,96	1.881.883.219.116
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.f	6.859.904.339.304	6.528.360.208.967	95,17	4.800.615.589.631
28	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	5.1.2.1.1.g	-	240.163	-	244.634.952
29	Jumlah Belanja Operasi (22 s/d 28)		57.799.906.974.328	53.925.743.776.335	93,30	43.835.699.863.256
30	BELANJA MODAL					
31	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	1.822.545.216.857	1.419.026.055.604	77,86	966.123.937.172
32	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	1.661.663.174.359	1.325.812.140.715	79,79	762.688.080.788
33	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	2.346.956.703.995	2.148.875.330.166	91,56	413.005.828.424
34	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	2.555.189.663.564	1.651.626.167.407	64,64	917.724.640.118
35	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	374.784.971.190	320.487.322.827	85,51	113.681.034.380
36	Jumlah Belanja Modal (31 s/d 35)		8.761.139.729.965	6.865.827.016.719	78,37	3.173.223.520.882
37	BELANJA TAK TERDUGA					
38	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	3.043.969.206.971	439.889.457.199	14,45	4.707.937.545.524
39	Jumlah Belanja Tak Terduga (38)		3.043.969.206.971	439.889.457.199	14,45	4.707.937.545.524
40	Jumlah Belanja (29 + 36 + 39)		69.605.015.911.264	61.231.460.250.253	87,97	51.716.860.929.662
41	TRANSFER					
42	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
43	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.1.4	387.604.963.312	387.579.910.312	99,99	371.272.698.360
44	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (43)		387.604.963.312	387.579.910.312	99,99	371.272.698.360
45	Jumlah Transfer		387.604.963.312	387.579.910.312	99,99	371.272.698.360
46	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (40 + 45)		69.992.620.874.576	61.619.040.160.565	88,04	52.088.133.628.022
47	SURPLUS/DEFISIT (19 - 46)		(4.783.515.833.781)	3.947.969.038.435		3.798.870.609.705
48	PEMBIAYAAN					
49	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
50	Penggunaan SILPA	5.1.3	5.165.696.290.359	5.165.696.290.359	100,00	1.203.971.456.696
51	Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1	-	-	0,00	1.474.792.321.413
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		9.515.434.570.093	6.744.329.136.564	70,88	2.903.531.014.390
57	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	4.171.220.068	-	-
54	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	-	-	521.787.313
55	Jumlah Penerimaan (50 s/d 54)		14.681.130.860.452	11.914.196.646.991	81,15	5.582.816.579.812

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2021	(Dalam Rupiah)		
				Realisasi 31 Desember 2021 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2020 (Audited)
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
57	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	95.680.795.237
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		9.663.965.026.671	5.906.817.230.655	61,12	4.086.680.720.654
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		33.650.000.000	33.629.623.430	99,94	33.629.623.430
66	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		200.000.000.000	200.000.000.000	-	-
63	Jumlah Pengeluaran (57 s/d 62)		9.897.615.026.671	6.140.446.854.085	62,04	4.215.991.139.321
64	PEMBIAYAAN NETO (55 - 63)		4.783.515.833.781	5.773.749.792.906		1.366.825.440.491
65	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (47 + 64)			9.721.718.831.341		5.165.696.050.196
66	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi			-		240.163
67	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Koreksi dan Penyesuaian (65 + 66)			9.721.718.831.341		5.165.696.290.359

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 27 Mei 2022

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2016	Realisasi Audited 2016	(%)	Realisasi Audited 2015
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	33.100.000.000.000	31.613.197.634.662	95,51	29.076.926.598.506
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	649.175.000.000	675.475.066.072	104,05	459.459.498.063
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	324.739.130.552	303.204.423.956	93,37	527.280.486.037
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.427.870.709.186	4.296.140.463.026	97,02	3.622.510.233.102
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		38.501.784.839.738	36.888.017.587.716	95,81	33.686.176.815.708
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	12.302.767.116.994	12.304.612.421.602	100,01	5.751.741.852.400
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	43.142.663.000	83.970.656.912	194,63	135.525.792.297
13	Dana Alokasi Umum		-	-	~	-
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	3.644.458.246.000	2.883.078.374.200	79,11	-
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		15.990.368.025.994	15.271.661.452.714	95,51	5.887.267.644.697
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	~	-
19	Dana Penyesuaian		-	-	~	2.755.110.753.389
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)		-	-	~	2.755.110.753.389
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)		15.990.368.025.994	15.271.661.452.714	95,51	8.642.378.398.086
22						
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.669.095.600.000	1.625.027.272.083	60,88	1.880.682.954.789
25	Pendapatan Dana Darurat		-	-	~	-
26	Pendapatan Lainnya		-	-	~	-
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)		2.669.095.600.000	1.625.027.272.083	60,88	1.880.682.954.789
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)		57.161.248.465.732	53.784.706.312.513	94,09	44.209.238.168.583
29	BELANJA					
30	BELANJA OPERASI					
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.a	21.484.497.759.347	19.359.807.013.530	90,11	17.312.344.016.739
32	Belanja Barang	5.1.2.1.1.b	16.812.849.152.875	13.062.670.779.326	77,69	10.633.820.105.891
33	Bunga	5.1.2.1.1.c	30.000.000.000	11.739.277.402	39,13	5.478.639.527
34	Subsidi	5.1.2.1.1.d	1.335.426.275.800	903.898.736.862	67,69	659.081.781.344
35	Hibah	5.1.2.1.1.e	2.248.455.193.332	2.161.217.950.484	96,12	1.717.428.915.536
36	Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.f	2.503.493.425.000	2.452.948.130.000	97,98	2.087.123.200.000
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)		44.414.721.806.354	37.952.281.887.604	85,45	32.415.276.659.037
38						
39	BELANJA MODAL					
40	Belanja Tanah	5.1.2.1.2.a	3.032.948.358.774	1.970.939.912.239	64,98	3.451.775.763.772
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.2.b	2.288.861.798.125	1.780.464.137.977	77,79	2.002.190.574.946
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2.c	2.649.835.256.840	1.687.059.996.551	63,67	2.063.978.323.661
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.2.d	4.351.189.733.684	3.287.656.766.815	75,56	2.685.243.694.385
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.2.e	303.312.158.476	239.349.200.951	78,91	40.828.352.444
45	Belanja Aset Lainnya		-	-	~	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)		12.626.147.305.899	8.965.470.014.533	71,01	10.244.016.709.208
47						
48	BELANJA TAK TERDUGA					
49	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.3	108.411.688.403	744.309.687	0,69	877.074.802
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49)		108.411.688.403	744.309.687	0,69	877.074.802
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)		57.149.280.800.656	46.918.496.211.824	82,10	42.660.170.443.047
52						
53	TRANSFER					
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA					
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		-	-	~	-
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	-	~	-
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-	~	-
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)		-	-	~	-
59						
60	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
61	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.4	213.601.848.300	208.527.191.300	97,62	371.152.504.510
62	Bantuan Keuangan Lainnya		2.157.666.410	1.786.842.730	82,81	-
63	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (61 s/d 62)		215.759.514.710	210.314.034.030	97,48	371.152.504.510
64	Jumlah Transfer (58 + 63)		215.759.514.710	210.314.034.030	97,48	371.152.504.510
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 64)		57.365.040.315.366	47.128.810.245.854	82,16	43.031.322.947.557
66						
67	SURPLUS/DEFISIT (28 - 65)		(203.791.849.634)	6.655.896.066.659	~	1.177.915.221.026

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2016	Realisasi Audited 2016	(%)	Realisasi Audited 2015
68						
69	PEMBIAYAAN	5.1.3				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
71	Penggunaan SiLPA		4.933.519.451.750	4.933.519.451.750	100,00	9.160.897.609.233
72	Pencairan Dana Cadangan		-	-	~	-
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	~	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		379.902.397.884	335.756.625.269	88,38	48.884.300.406
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	~	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	~	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	~	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	~	-
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	~	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	~	-
81	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		435.368.000.000	338.475.881.319	77,74	-
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)		5.748.789.849.634	5.607.751.958.338	97,55	9.209.781.909.639
84						
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
86	Pembentukan Dana Cadangan		-	81.575.989.831	~	78.999.209.715
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.544.998.000.000	4.475.782.698.443	80,72	5.371.093.824.789
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	~	4.084.644.411
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	~	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	~	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	~	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	~	-
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	~	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	~	-
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
97	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)		5.544.998.000.000	4.557.358.688.274	82,19	5.454.177.678.915
98	PEMBIAYAAN NETO (83 - 97)		203.791.849.634	1.050.393.270.064		3.755.604.230.724
99	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 98)			7.706.289.336.723		4.933.519.451.750

Jakarta,



Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2017	Realisasi Audited 2017	(%)	Realisasi Per 31 Desember 2016 (Audited)
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	35.359.500.000.000	36.500.782.266.176	103,23	31.613.197.634.662
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	680.152.300.000	624.137.343.759	91,76	675.475.066.072
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	465.893.684.641	489.478.684.673	105,06	303.204.423.956
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	5.181.841.841.894	6.287.090.513.134	121,33	4.296.140.463.026
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		41.687.387.826.535	43.901.488.807.743	105,31	36.888.017.587.716
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	15.384.527.488.000	16.605.608.520.001	107,94	12.304.612.421.602
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	152.529.563.000	241.880.930.262	158,58	83.970.656.912
13	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1	3.159.283.549.000	2.121.801.939.666	67,16	2.883.078.374.200
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		18.696.340.600.000	18.969.291.389.929	101,46	15.271.661.452.714
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)					
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)		18.696.340.600.000	18.969.291.389.929	101,46	15.271.661.452.714
22						
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.134.015.600.000	1.953.107.172.148	91,52	1.625.027.272.083
25	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
26	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)		2.134.015.600.000	1.953.107.172.148	91,52	1.625.027.272.083
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)		62.517.744.026.535	64.823.887.369.820	103,89	53.784.706.312.513
29	BELANJA					
30	BELANJA OPERASI					
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	22.606.123.775.863	20.245.514.324.792	89,56	19.359.807.013.530
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.1.b	16.737.239.960.178	13.662.113.026.908	81,63	13.062.670.779.326
33	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	35.556.257.523	31.897.471.844	89,71	11.739.277.402
34	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	1.921.329.347.884	1.405.914.619.150	73,17	903.898.736.862
35	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	1.472.760.030.329	1.112.078.352.913	75,51	2.161.217.950.484
36	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	3.233.845.700.000	3.202.680.640.000	99,04	2.452.948.130.000
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)		46.006.855.071.777	39.660.198.435.607	86,20	37.952.281.887.604
38						
39	BELANJA MODAL					
40	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	2.241.740.188.724	1.291.846.953.545	57,63	1.970.939.912.239
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	2.407.300.491.085	1.934.885.465.301	80,38	1.780.464.137.977
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	8.338.550.723.893	5.837.362.392.365	70,43	1.687.059.996.551
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	2.462.201.669.794	1.974.059.648.125	80,17	3.287.656.766.815
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	10.437.773.433	7.568.774.290	72,51	239.349.200.951
45	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)		15.410.230.846.929	11.045.723.233.626	71,68	8.965.470.014.533
47						
48	BELANJA TAK TERDUGA					
49	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	40.114.311.774	16.038.572.534	39,98	744.309.687
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49)		40.114.311.774	16.038.572.534	39,98	744.309.687
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)		61.457.200.230.480	50.721.960.241.767	82,53	46.918.496.211.824
52						
53	TRANSFER					
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA					
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)					
59						
60	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
61	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3	346.986.146.000	342.488.546.000	98,70	208.527.191.300
62	Bantuan Keuangan Lainnya	-	17.736.624.000	1.632.592.120	9,20	1.786.842.730
63	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (61 s/d 62)		364.722.770.000	344.121.138.120	94,35	210.314.034.030
64	Jumlah Transfer (58 + 63)		364.722.770.000	344.121.138.120	94,35	210.314.034.030
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 64)		61.821.923.000.480	51.066.081.379.887	82,60	47.128.810.245.854
66						
67	SURPLUS/DEFISIT (28 - 65)		695.821.026.055	13.757.805.989.933	-	6.655.896.066.659
68						
69	PEMBIAYAAN	5.1.4				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
71	Penggunaan SILPA	-	7.706.289.336.723	7.706.289.336.723	100,00	4.933.519.451.750
72	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.599.542.000.000	1.003.985.193.194	62,77	335.756.625.269
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)						
NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2017	Realisasi Audited 2017	(%)	Realisasi Per 31 Desember 2016 (Audited)
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	-
82	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	1.542.832.382	-	338.475.881.319
83	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
84	Jumlah Penerimaan (71 s/d 83)		9.305.831.336.723	8.711.817.362.299	93,62	5.607.751.958.338
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
86	Pembentukan Dana Cadangan		-	79.391.502.822	-	81.575.989.831
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		9.984.453.464.820	9.207.434.910.162	92,22	4.475.782.698.443
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		17.198.897.958	16.814.811.715	97,77	-
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-	-
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	-
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
97	Jumlah Pengeluaran (93 s/d 97)		10.001.652.362.778	9.303.641.224.699	93,02	4.557.358.688.274
98	PEMBIAYAAN NETO (84 - 98)		(695.821.026.055)	(591.823.862.400)		1.050.393.270.064
99	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)			13.165.982.127.533		7.706.289.336.723
100						

Jakarta, 25 Mei 2018
 Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Baswedan, Ph.D



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2018	Realisasi 31 Desember 2018 (Audited)	(%)	Realisasi Per 31 Desember 2017 (Audited)
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98,46	36.500.782.266.176
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	671.490.000.000	578.555.603.994	86,16	624.137.343.759
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	592.740.014.202	592.956.276.353	100,04	489.478.684.673
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.960.847.844.642	4.616.712.395.152	93,06	6.287.090.513.135
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69	43.901.488.807.743
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	18.105.337.484.000	15.026.197.590.222	82,99	16.605.608.520.001
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	159.891.125.000	183.375.491.488	114,69	241.880.930.262
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1	3.136.629.255.000	2.645.603.991.214	84,35	2.121.801.939.666
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 13)		21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
15	Total Pendapatan Transfer (14)		21.401.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
16						
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
18	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
19	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (18 s/d 20)		57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
20	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 15 + 19)		65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05	64.823.887.369.820
21	BELANJA					
22	BELANJA OPERASI					
23	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	23.520.650.861.578	21.852.416.650.509	92,91	20.245.514.324.792
24	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.1.b	20.479.877.008.398	16.919.780.405.273	82,62	13.662.113.026.908
25	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	51.000.000.000	44.048.569.889	86,37	31.897.471.844
26	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	4.210.500.000.000	2.640.949.492.360	62,72	1.405.914.619.150
27	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27	1.112.078.352.913
28	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	4.183.520.562.000	4.063.970.052.586	97,14	3.202.680.640.000
29	Jumlah Belanja Operasi (23 s/d 28)		54.334.845.424.970	46.943.316.200.855	86,40	39.660.198.435.607
30						
31	BELANJA MODAL					
32	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	6.612.669.058.425	5.493.373.929.929	83,07	1.291.846.953.545
33	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	3.034.263.620.851	2.503.550.334.498	82,51	1.934.885.465.301
34	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	4.730.610.014.327	3.787.773.213.370	80,07	5.837.362.392.365
35	Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	2.878.376.382.111	2.195.927.869.729	76,29	1.974.059.648.125
36	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	182.157.854.496	137.982.740.117	75,75	7.568.774.290
37	Jumlah Belanja Modal (32 s/d 37)		17.438.076.930.210	14.118.608.087.643	80,96	11.045.723.233.626
38						
39	BELANJA TAK TERDUGA					
40	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
41	Jumlah Belanja Tak Terduga (40)		2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	16.038.572.534
42	Jumlah Belanja (29 + 37 + 41)		74.729.343.748.013	61.063.848.818.057	81,71	50.721.960.241.767
43						
44	TRANSFER					
45	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
46	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3	359.166.525.000	340.952.047.100	94,93	342.488.546.000
47	Bantuan Keuangan Lainnya		5.320.987.200	5.320.986.000	100,00	1.632.592.120
48	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (46 s/d 47)		364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
49	Jumlah Transfer (48)		364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
50	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (42 + 49)		75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	51.066.081.379.887
51						
52	SURPLUS/DEFISIT (20 - 50)		(9.283.899.537.369)	(174.297.103.524)	-	13.757.805.969.933
53						
54	PEMBIAYAAN	5.1.4				
55	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
56	Penggunaan SILPA		13.165.982.127.533	13.165.646.901.882	100,00	7.706.289.336.723
57	SILPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya		-	13.165.982.127.533	~	7.706.289.336.723
58	Koreksi SILPA APBD (SILPA BOS)		-	(335.225.651)	~	-
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		3.636.325.000.000	3.619.441.859.550	99,54	1.003.985.193.194
60	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah		650.000.000.000	650.000.000.000	~	-
61	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	314.382.669	~	1.542.832.382
62	Jumlah Penerimaan (56 s/d 62)		17.452.307.127.533	17.435.403.144.101	99,90	8.711.817.362.299

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)						
NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2018	Realisasi 31 Desember 2018 (Audited)	(%)	Realisasi Per 31 Desember 2017 (Audited)
63	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
64	Pembentukan Dana Cadangan		-	76.817.812.254	0,00	79.391.502.822
65	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.416.877.590.164	7.395.509.521.612	99,71	9.207.434.910.162
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		33.630.000.000	33.629.623.430	100,00	16.814.811.715
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		717.900.000.000	-	~	-
68	Jumlah Pengeluaran (65 s/d 69)		8.168.407.590.164	7.505.956.957.296	91,89	9.303.641.224.699
69	PEMBIAYAAN NETO (62 - 69)		9.283.899.537.369	9.929.446.186.805		(591.823.862.400)
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (52 + 70)			9.755.149.083.281		13.165.982.127.533
71	Penyesuaian; Selisih Kurs Belum Terealisasi		-	(66.360.505)	0,00	-
72	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Koreksi dan Penyesuaian (71 + 72)			9.755.082.722.776		13.165.982.127.533

Jakarta, 14 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019 Audited	(%)	Realisasi 2018 Audited
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	44.540.000.000.000	40.298.122.505.326	90,48	37.538.912.327.312
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	710.131.000.000	587.384.031.230	82,71	578.555.603.994
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	618.380.216.460	619.456.466.460	100,17	592.956.276.353
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.976.570.675.006	4.202.437.000.786	84,44	4.616.712.395.152
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90	43.327.136.602.811
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	18.019.903.810.075	11.585.304.508.454	64,29	15.026.197.590.222
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	132.856.728.940	113.085.037.731	85,12	183.375.491.488
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	3.156.303.637.000	2.796.003.496.994	88,58	2.645.603.991.214
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 13)		21.309.064.176.015	14.494.393.043.179	68,02	17.855.177.072.924
15						
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
17	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2	57.178.308.000	57.178.308.000	100,00	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17)		57.178.308.000	57.178.308.000	100,00	-
19	Total Pendapatan Transfer (14 + 18)		21.366.242.484.015	14.551.571.351.179	68,11	17.855.177.072.924
20						
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
22	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.786.173.000.000	2.041.708.478.087	73,28	53.511.071.898
23	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (22)		2.786.173.000.000	2.041.708.478.087	73,28	53.511.071.898
24	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 19 + 23)		74.997.497.375.481	62.300.679.833.068	83,07	61.235.824.747.633
25	BELANJA					
26	BELANJA OPERASI					
27	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	23.276.718.199.848	22.016.852.174.914	94,59	21.852.416.650.509
28	Belanja Barang	5.1.2.1.1.1.b	23.976.819.799.778	20.807.658.518.255	86,78	16.919.780.405.273
29	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	76.000.000.000	60.785.495.306	79,98	44.048.569.889
30	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	4.797.631.637.216	2.782.933.713.289	58,01	2.640.949.492.360
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	2.753.054.702.361	2.475.188.905.410	89,91	1.422.151.030.238
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	4.466.438.312.000	4.402.326.917.199	98,56	4.063.970.052.586
33	Jumlah Belanja Operasi (27 s/d 32)		59.346.662.651.203	52.545.745.724.373	88,54	46.943.316.200.855
34						
35	BELANJA MODAL					
36	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	5.362.043.076.662	2.338.517.736.816	43,61	5.493.373.929.929
37	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	3.313.924.706.101	2.820.376.301.889	85,11	2.503.550.334.498
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	5.271.058.319.964	3.811.316.212.589	72,31	3.787.773.213.370
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	3.254.146.768.454	2.426.554.322.512	74,57	2.195.927.869.729
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	193.210.270.968	155.163.205.784	80,31	137.982.740.117
41	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 40)		17.394.383.142.149	11.551.927.779.590	66,41	14.118.608.087.643
42						
43	BELANJA TAK TERDUGA					
44	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	269.318.083.509	1.613.965.050	0,60	1.924.529.559
45	Jumlah Belanja Tak Terduga (44)		269.318.083.509	1.613.965.050	0,60	1.924.529.559
46	Jumlah Belanja (33 + 41 + 45)		77.010.363.876.861	64.099.287.469.013	83,23	61.063.848.818.057
47						
48	TRANSFER					
49	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.1.2				
50	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		835.790.862.500	827.620.588.200	99,02	340.952.047.100
51	Bantuan Keuangan Lainnya		11.455.624.800	11.455.624.800	100,00	5.320.986.000
52	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (50 s/d 51)		847.246.487.300	839.076.213.000	99,04	346.273.033.100
53	Jumlah Transfer (52)		847.246.487.300	839.076.213.000	99,04	346.273.033.100
54	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46 + 53)		77.857.610.364.161	64.938.363.682.013	83,41	61.410.121.851.157
55						
56	SURPLUS/DEFISIT (24 - 54)		(2.860.112.988.680)	(2.637.683.848.945)		(174.297.103.524)
57						
58	PEMBIAYAAN					
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
60	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	9.755.082.722.776	9.755.082.722.776	100,00	13.165.646.901.882
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.3.1.2.a	2.139.917.000.000	1.971.239.845.495	92,12	3.619.441.859.550
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.3.1.2.b	-	53.918.320.859	-	-
63	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	650.000.000.000
64	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	5.1.3.1.3	-	1.717.652.577	-	314.382.669
65	Jumlah Penerimaan (60 s/d 64)		11.894.999.722.776	11.781.958.541.707	99,05	17.435.403.144.101

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019 Audited	(%)	Realisasi 2018 Audited
66	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
68	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	-	95.110.472.253	-	76.817.812.254
69	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	8.602.612.000.000	7.402.197.169.911	86,05	7.395.509.521.612
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.3.2.3.a	33.650.000.000	33.629.623.430	99,94	33.629.623.430
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.3.2.3.b	-	53.918.320.859	-	-
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.1.3.2.4	350.000.000.000	350.000.000.000	100,00	-
73	Pengeluaran Pembiayaan BLUD	5.1.3.2.5	48.624.734.096	-	-	-
74	Jumlah Pengeluaran (68 s/d 73)		9.034.886.734.096	7.934.855.586.453	87,82	7.505.956.957.296
75	PEMBIAYAAN NETO (65 - 74)		2.860.112.988.680	3.847.102.955.254		9.929.446.186.805
76	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (56 + 75)			1.209.419.106.309		9.755.149.083.281
77	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi			(5.447.649.613)		(66.360.505)
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Koreksi dan Penyesuaian (76 + 77)			1.203.971.456.696		9.755.082.722.776

Jakarta, 19 Juni 2020

Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,



Pris Baswedan, Ph.D

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2020	Realisasi 31 Desember 2020 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2019 (Audited)
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	32.480.000.000.000	31.895.263.277.623	98,20	40.298.122.505.326
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	468.413.750.000	496.332.944.408	105,96	587.384.031.230
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	844.471.501.251	672.491.534.639	79,63	619.456.466.460
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.293.100.365.380	4.350.666.954.523	101,34	4.202.437.000.786
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24	45.707.400.003.802
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	13.567.076.479.733	13.567.076.479.733	100,00	11.585.304.508.454
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	80.882.005.322	80.882.005.322	100,00	113.085.037.731
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1	3.405.403.588.783	3.249.763.828.577	95,43	2.796.003.496.994
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 12)		17.053.362.073.838	16.897.722.313.632	99,09	14.494.393.043.179
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
15	Dana Penyesuaian		65.176.975.000	65.176.975.000	100,00	57.178.308.000
16	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (15)		65.176.975.000	65.176.975.000	100,00	57.178.308.000
17	Total Pendapatan Transfer (13 + 16)		17.118.539.048.838	16.962.899.288.632	99,09	14.551.571.351.179
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
19	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.030.094.100.000	1.509.350.237.902	74,35	2.041.708.478.087
20	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (19)		2.030.094.100.000	1.509.350.237.902	74,35	2.041.708.478.087
21	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 17 + 20)		57.234.618.765.469	55.887.004.237.727	97,65	62.300.679.833.068
22	BELANJA					
23	BELANJA OPERASI					
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	18.991.305.934.796	16.686.870.974.289	87,87	22.016.852.174.914
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.1.b	18.098.721.223.094	16.775.617.945.811	92,69	20.807.658.518.255
26	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	76.000.000.000	62.300.098.791	81,97	60.785.495.306
27	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	4.508.890.241.433	3.628.167.400.666	80,47	2.782.933.713.289
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	2.373.116.610.792	1.881.883.219.116	79,30	2.475.188.905.410
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	5.113.560.031.000	4.800.615.589.631	93,88	4.402.326.917.199
30	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	5.1.2.1.1.1.g	-	244.634.952	-	-
31	Jumlah Belanja Operasi (24 s/d 30)		49.161.594.041.115	43.835.699.863.256	89,17	52.545.745.724.373
32	BELANJA MODAL					
33	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	1.391.228.958.839	966.123.937.172	69,44	2.338.517.736.816
34	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	824.202.624.687	762.688.080.788	92,54	2.820.376.301.889
35	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	464.296.531.424	413.005.828.424	88,95	3.811.316.212.589
36	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	1.087.282.194.604	917.724.640.118	84,41	2.426.554.322.512
37	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	129.664.696.870	113.681.034.380	87,67	155.163.205.784
38	Jumlah Belanja Modal (33 s/d 37)		3.896.675.006.424	3.173.223.520.882	81,43	11.551.927.779.590
39	BELANJA TAK TERDUGA					
40	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	5.521.444.220.129	4.707.937.545.524	85,27	1.613.965.050
41	Jumlah Belanja Tak Terduga (40)		5.521.444.220.129	4.707.937.545.524	85,27	1.613.965.050
42	Jumlah Belanja (31 + 38 + 41)		58.579.713.267.668	51.716.860.929.662	88,28	64.099.287.469.013
43	TRANSFER					
44	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
45	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3	371.358.448.200	371.272.698.360	99,98	827.620.588.200
46	Bantuan Keuangan Lainnya		-	-	-	11.455.624.800
47	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (45 s/d 46)		371.358.448.200	371.272.698.360	99,98	839.076.213.000
48	Jumlah Transfer		371.358.448.200	371.272.698.360	99,98	839.076.213.000
49	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (42 + 48)		58.951.071.715.868	52.088.133.628.022	88,36	64.938.363.682.013
50	SURPLUS/DEFISIT (21 - 49)		(1.716.452.950.399)	3.798.870.609.705		(2.637.683.848.945)
51	PEMBIAYAAN					
52	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
53	Penggunaan SiLPA	5.1.4	1.203.971.456.696	1.203.971.456.696	100,00	9.755.082.722.776
54	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1	1.400.000.000.000	1.474.792.321.413	105,34	-
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		3.562.513.493.703	2.903.531.014.390	81,50	1.971.239.845.495
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	53.918.320.859
57	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	521.787.313	-	1.717.652.577
58	Jumlah Penerimaan (53 s/d 57)		6.166.484.950.399	5.582.816.579.812	90,53	11.781.958.541.707

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2020	Realisasi 31 Desember 2020 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2019 (Audited)
59	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
60	Pembentukan Dana Cadangan		-	95.680.795.237	~	95.110.472.253
61	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.416.382.000.000	4.086.680.720.654	92,53	7.402.197.169.911
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		33.650.000.000	33.629.623.430	99,94	33.629.623.430
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	~	53.918.320.859
65	Pembiayaan Fasilitas Perumahan		-	-	~	350.000.000.000
66	Jumlah Pengeluaran (60 s/d 65)		4.450.032.000.000	4.215.991.139.321	94,74	7.934.855.586.453
67	PEMBIAYAAN NETO (58 - 66)		1.716.452.950.399	1.366.825.440.491		3.847.102.955.254
68	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (50 + 67)			5.165.696.050.196		1.209.419.106.309
69	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi			240.163		(5.447.649.613)
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Koreksi dan Penyesuaian (68 + 69)			5.165.696.290.359		1.203.971.456.696

Jakarta, 28 Mei 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.